

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 2, September 2023

ISSN: 2087-2054

Kontribusi Kemampuan Manajerial Terhadap Motivasi Berwirausaha Dan Iklim Usaha Dan Dampaknya Pada Kinerja UMKM

Eka Travilta Oktaria, Hairudin

Analisis Trend sebagai Media untuk Menaksir Kinerja Keuangan Pada PT Media Nusantara Citra Tbk

Tanti Pratiwi, Hari Sulistiyo

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Hermawan Sutanto, Amelia Lautan

Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Latersia Br Gurusinga, Natasya Lovett Michelle

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan

Maristiana Ayu, Niar Azriya, Rici Oviana

Analisis Pengaruh Arus Kas, Profitabilitas, *Leverage* Terhadap *Financial Distress* Pada Perusahaan Initial Public Offering Tahun 2022

Yohanes Adven Arelio, Victoria Ari Palma Akadiati, Imelda Sinaga

Pengaruh Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Size Perusahaan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Peserta Proper Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)

Habiburrahman, Ervilia Dwi Nanda P

Determinasi Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Tambang Di Indonesia

Nurdiawansyah, Luke Suciwati Amna, Tri Lestira Putri Warganegara, Putri Bulan Bumi Aji, Eva Setiani Sugiono Pratomo

Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bandar Lampung

Ni Putu Widhia Rahayu, Tia Tanjung

Menilai Pembangunan Good Government Governance di Indonesia

Khairudin, Sartono, Aminah, Tina Miniawati Barusman, Afrizal Nilwan

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 2, September 2023

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Prof. Dr. Iskandar Ali Alam S.E., M.M.

Editor in Chief

Aminah, S.E., M.S.Ak.

Managing Editor

Luke Suciwati Amna, S.E., M.S.Ak.

Editor

Khairudin S.E., M.S.Ak.
Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak.

Penyuting Ahli (Mitra Bestari)

Dr. Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung)
Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telah teoritis konseptual yang kritis
dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung F- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 2, September 2023

ISSN: 2087-2054

Kontribusi Kemampuan Manajerial Terhadap Motivasi Berwirausaha Dan Iklim Usaha Dan Dampaknya Pada Kinerja UMKM

Eka Travilta Oktaria, Hairudin

Analisis Trend sebagai Media untuk Menaksir Kinerja Keuangan Pada PT Media Nusantara Citra Tbk

Tanti Pratiwi, Hari Sulistiyo

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Hermawan Sutanto, Amelia Lautan

Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Latersia Br Gurusinga, Natasya Lovett Michelle

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan

Maristiana Ayu, Niar Azriya, Rici Oviana

Analisis Pengaruh Arus Kas, Profitabilitas, Leverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Initial Public Offering Tahun 2022

Yohanes Adven Arelio, Victoria Ari Palma Akadiati, Imelda Sinaga

Pengaruh Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Size Perusahaan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Peserta Proper Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021)

Habibburrahman, Ervilia Dwi Nanda P

Determinasi Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Tambang Di Indonesia

Nurdiawansyah, Luke Suciyati Amna, Tri Lestira Putri Warganegara, Putri Bulan Bumi Aji, Eva Setiani Sugiono Pratomo

Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bandar Lampung

Ni Putu Widhia Rahayu, Tia Tanjung

Menilai Pembangunan Good Government Governance di Indonesia

Khairudin, Sartono, Aminah, Tina Miniawati Barusman, Afrizal Nilwan

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 2, September 2023

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Kontribusi Kemampuan Manajerial Terhadap Motivasi Berwirausaha Dan Iklim Usaha Dan Dampaknya Pada Kinerja UMKM Eka Travilta Oktaria, Hairudin	1-19
Analisis Trend sebagai Media untuk Menaksir Kinerja Keuangan Pada PT Media Nusantara Citra Tbk Tanti Pratiwi, Hari Sulistiyo	20-34
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai Hermawan Sutanto, Amelia Lautan	35-47
Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Latersia Br Gurusinga, Natasya Lovett Michelle	48-62
Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Maristiana Ayu, Niar Azriya, Rici Oviana	63-69
Analisis Pengaruh Arus Kas, Profitabilitas, Leverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Initial Public Offering Tahun 2022 Yohanes Adven Arelio, Victoria Ari Palma Akadiati, Imelda Sinaga	70-87
Pengaruh Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, Size Perusahaan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Peserta Proper Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021) Habibburrahman, Ervilia Dwi Nanda P	88-99
Determinasi Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Tambang Di Indonesia Nurdiawansyah, Luke Suciyati Amna, Tri Lestira Putri Warganegara, Putri Bulan Bumi Aji, Eva Setiani Sugiono Pratomo	100-112

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 2, September 2023

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bandar Lampung Ni Putu Widhia Rahayu, Tia Tanjung	113-131
Menilai Pembangunan Good Government Governance di Indonesia Khairudin, Sartono, Aminah, Tina Miniawati Barusman, Afrizal Nilwan	132-142

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 2, September 2023

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
 - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
 - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
 - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
 - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
 - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
 - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
 - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

Menilai Pembangunan *Good Government Governance* di Indonesia

Khairudin¹,
Sartono²,
Aminah³,
Tina Miniawati Barusman⁴,
Afrizal Nilwan⁵

^{1,3,4,5}Universitas Bandar Lampung, Lampung

²Universitas Panca Bhakti, Pontianak

E-Mail:

khairudin@ubl.ac.id

sartono@upb.ac.id

aminah@ubl.ac.id

tina@ubl.ac.id

nilwan@ubl.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pembangunan *good government governance* di Indonesia. Kualitas pembangunan *good government governance* dinilai menggunakan *governance index* yang dibangun dengan metode *Principal Component Analysis* meliputi prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, prinsip budaya hukum serta prinsip kewajaran dan kesetaraan. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa (1) 76,47% pemerintah provinsi pembangunan *good government governance* pada berkualitas “baik” dan 23,53% pemerintah provinsi dengan kualitas *good government governance* yang “cukup baik”; (2) Provinsi Bali merupakan pemerintah provinsi di Indonesia yang terbaik dalam implementasi *good governance*, sedangkan Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi terburuk untuk kualitas pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Temuan ini menjadi bukti empiris pentingnya komitmen semua pihak untuk bersinergi memperkuat implementasi prinsip-prinsip *good government governance*.

Kata Kunci: *Good Government Governance*

PENDAHULUAN

Konsep *good governance* merupakan sebuah konsep yang cukup revolusioner untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi negara-negara berkembang (Holzhacker et al., 2016). Hadirnya konsep *good governance* telah menjadi berita baik bagi negara-negara berkembang karena permasalahan ekonomi, kemiskinan dan juga kelaparan yang disebabkan masih buruknya penyelenggaraan pemerintah (Andhika, 2017).

Masalah *governance* di sektor publik telah mendapat perhatian besar di Indonesia sejak pertengahan 2000, dimana pada 30 November 2004 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan tugas memperluas cakupan *corporate governance* di sektor public karena konsep *good governance* diyakini mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap melalui penyelenggaraan negara yang efisien dan efektif (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh (Keser & Gökmen, 2018; AlBassam, 2013; Ottervik, 2011; Sebudubudu, 2010) yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* pada organisasi pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara signifikan baik pada kondisi normal maupun pada masa krisis ekonomi global, sedangkan Susanto *et al.* (2014) menyatakan bahwa penerapan *good governance* pada organisasi pemerintah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya Shleifer & Vishny (1997) menyatakan bahwa penerapan *good governance* pada suatu organisasi dapat mengatasi permasalahan agensi. Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa penerapan *good governance* dapat meningkatkan kualitas, pelayanan publik, menurunkan praktek korupsi, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

World Bank (2019) melalui laporannya menempatkan pemerintah Indonesia pada posisi 107 dari 214 negara yang disurvei dengan nilai indeks *governance* 46,48 dibawah negara Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Informasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan *good government governance* di Indonesia masih belum baik, dan belum baiknya kualitas *good government governance* ini memberikan dampak negatif pada berbagai sektor, seperti tumbuh dan berkembangnya praktek korupsi (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017; Lindstedt & Naurin, 2010); pertumbuhan ekonomi yang lambat (AlBassam, 2013); meningkatnya kemiskinan (Sebudubudu, 2010); kesejahteraan yang melambat (Keser & Gökmen, 2018; Ottervik, 2011) serta menurunnya kepercayaan publik (Cheung, 2013).

Penelitian tentang *good governance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Susanto *et al.*, (2014) melakukan penelitian tentang *good governance* dan kualitas pelayanan untuk 33 pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2012, dimana *good governance* diukur menggunakan indeks *governance* dari Indonesia Governance Indeks. Hasil temuan menunjukkan bahwa rata-rata indeks *good governance* sebesar 5,70 (predikat cukup). Rahayuningtyas & Setyaningrum (2017) menyatakan bahwa rata-rata tingkat akuntabilitas pemda di Indonesia adalah 61% (predikat baik) dan rata-rata tingkat transparansi sebesar 70% (predikat baik). Berdasarkan perbedaan hasil temuan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas pembangunan *good government governance* di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pengukuran *good governance*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi para *stakeholder* untuk meningkatkan kualitas *good government governance* dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi pemerintah daerah di Indonesia.

Good government governance pada riset ini diukur dengan *governance* indeks menggunakan metode *Principal Component Analysis* (Zou et al., 2006; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017) meliputi: prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan yang merupakan kebaruan riset ini. Pengukuran yang selama ini dipakai berupa indeks *governance* dari lembaga seperti Word Bank melalui *The Worldwide Governance Indicators* dan *The Partnership for Governance Reform* dalam bentuk indeks yang sudah jadi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017) dimana pengukuran *governance indeks* berdasarkan prinsip akuntabilitas, *fairness*, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan *responsiveness* yang diolah dengan metode *Principal Component Analysis*.

KAJIAN PUSTAKA & PERUMUSAN HIPOTESIS

Good governance merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010). *Good governance* juga merupakan tata pemerintahan yang baik untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (BAPPENAS, 2007). Penerapan *good governance* pada suatu organisasi memiliki dampak positif antara lain: meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Keser & Gökmen, 2018; AlBassam, 2013); meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing, meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010; Dwiyanto, 2006); meningkatkan kualitas pelayanan publik (Susanto et al., 2014; Dwiyanto, 2006); meminimalisir *agency problem* (Shleifer & Vishny, 1997). Pengukuran *good governance* pada umumnya menggunakan *governance* indeks yang diterbitkan oleh lembaga tertentu seperti *Word Bank* dan *The Partnership for Governance Reform* seperti yang dilakukan oleh (Sebudubudu, 2010; Ottervik, 2011; AlBassam, 2013; Susanto et al., 2014; Keser & Gökmen, 2018), dengan skala penilaian berkisar dari angka 1=sangat buruk sampai dengan angka 10=sangat baik. Selain itu, *governance* indeks dapat diolah dengan metode *Principal Component Analysis* (Zou et al., 2006; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia periode 2014-2018 karena pemerintah provinsi merupakan manifestasi kepanjangan tangan pemerintah pusat. *Governance* indeks dihitung menggunakan metode *Principal Component Analysis*, dimana untuk prinsip demokrasi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip budaya hukum serta prinsip kewajaran dan kesetaraan dihitung nilai indeksnya berdasarkan pengukuran yang ada dan kemudian dijumlahkan serta dihitung nilai rata-ratanya. Data penelitian ini diperoleh dari BPS-RI dan BPK-RI. Adapun pengukuran untuk masing-masing prinsip *good governance* dari KNKG sebagai berikut:

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (Rauf et al., 2014; Ibrahim, 2017).

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi ukuran transparansi sebagaimana penelitian (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011; Djasuli, 2013; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017). Pengukuran pengungkapan dilakukan dengan membandingkan antara pengungkapan dalam LKPD dibandingkan dengan pengungkapan wajib menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. (Heriningsih & Ruserlistyanti, 2015; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017).

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Tingkat akuntabilitas diukur dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya ditambah dengan yang tidak dapat ditindak lanjuti dibagi dengan total rekomendasi (Liu & Lin, 2012; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017). Semakin tinggi tingkat TLRHP, maka menunjukkan semakin tingginya kemauan pemda untuk memperbaiki penyelenggaraan keuangan negara dengan baik sehingga tercipta pelaksanaan GGG yang mencerminkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Budaya Hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya Hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Budaya hukum pada penelitian ini diukur dengan tingkat penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum (Soekanto, 2012; Arliman, 2019).

Kewajaran dan Kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan diukur dengan menggunakan opini audit yaitu apabila memperoleh opini WTP akan memperoleh poin 5, opini WTP DPP akan memperoleh poin 4, sedangkan opini WDP akan memperoleh poin 3, opini TW akan memperoleh poin 2 dan opini TMP akan memperoleh poin 1 (Heriningsih & Ruserlistyanti, 2015; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017). Kualitas pembangunan *good government governance* di Indonesia dilakukan dengan melihat trend nilai *governance* indek hasil pengolahan dengan metode *Principal Component Analysis* untuk masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kualitas Pembangunan GGG

Kualitas pembangunan *good government governance* di Indonesia berdasarkan metode *Principal Component Analysis* selama periode pengamatan menghasilkan informasi bahwa 26 atau 76,47% pemerintah provinsi memiliki kualitas yang “baik” dan 8 atau 23,53% memiliki kualitas “cukup baik”. Kualitas pembangunan *good government governance* dengan predikat “baik” meliputi 5 pemerintah provinsi di wilayah Sumatera, 1 pemerintah provinsi di wilayah Papua, seluruh pemerintah provinsi di wilayah Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan kualitas pembangunan *good government governance* dengan predikat “cukup” meliputi Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera

Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Provinsi Bali merupakan pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki nilai rata-rata *governance index* tertinggi sebesar 74,79 kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Utara dengan predikat “baik” yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi Bali merupakan provinsi terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Adapun Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang paling rendah untuk kualitas pembangunan *good government governance* di

Indonesia dengan nilai rata-rata *governance* indeks sebesar 49,21 dengan predikat “cukup”. Selanjutnya, berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia, wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang secara rata-rata lebih unggul dan lebih berkualitas dalam pembangunan *good government governance* dibandingkan dengan di wilayah lain di Indonesia dengan nilai rata-rata *governance* indeks sebesar 67,90 (predikat baik) sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah yang secara rata-rata kualitas pembangunan *good government governance* nya paling rendah dengan nilai rata-rata *governance* indeks sebesar 53,85 (predikat cukup). Rendahnya kualitas pembangunan *good government governance* di wilayah Maluku disebabkan karena pemerintah provinsi yang ada di wilayah Maluku merupakan provinsi yang termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Tingkat kesejahteraan yang rendah menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan pendapatan per-kapita suatu daerah yang tentunya akan menghambat pembangunan *good government governance* dan menjadikan kualitas *governance* indeks menjadi rendah, mengingat pembangunan *good government governance* yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga membutuhkan pendanaan yang cukup besar (Lampiran_Tabel 1).

Perkembangan pembangunan *good government governance* di Indonesia yang tersebar pada 7 wilayah mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, namun secara predikat tidak mengalami perubahan yakni predikat “baik”. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan *good government governance* di Indonesia adalah “baik” meskipun secara nilai cenderung menurun (Lampiran_Tabel 1). Temuan riset ini sejalan dengan hasil penelitian (Rasul, 2009; Djuaeni, 2015) yang menyatakan bahwa kualitas pembangunan *good governance* pada pemerintah provinsi di Indonesia masih belum baik yang disebabkan karena krisis multidimensi meliputi krisis moral, krisis hukum, krisis kepercayaan, dan krisis politik.

Kualitas Pembangunan Prinsip-Prinsip GGG

Prinsip-prinsip *good governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2010) meliputi: prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan. Hasil perhitungan menggunakan metode *Principal Component Analysis* untuk masing-masing prinsip-prinsip *good governance* tersebut sebagai berikut (Lampiran_Tabel 2):

Prinsip Demokrasi

nilai rata-rata indeks demokrasi pada pemerintah daerah di Indonesia sebesar 72,78 dengan predikat baik dan dari 34 pemerintah provinsi yang ada, 26 provinsi atau sekitar 75% nilai rata-rata indeks demokrasinya diatas 70 poin. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pembangunan demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik yang disebabkan oleh makin meningkatnya partisipasi warga negara dalam pembangunan dan makin meningkatnya pengakuan serta penghormatan atas perbedaan pendapat di masyarakat. Nilai rata-rata tertinggi indeks demokrasi di Indonesia selama periode pengamatan dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 83,18 (predikat sangat baik), sedangkan Provinsi Papua merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai rata-rata terendah untuk indeks demokrasi yakni sebesar 60,85 dengan predikat “cukup”. Selanjutnya berdasarkan pengelompokan wilayah di Indonesia, wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang paling unggul di Indonesia dalam hal pembangunan demokrasi

dimana nilai rata-rata tertinggi indeks demokrasi untuk wilayah Kalimantan sebesar 76,63 (predikat baik) dan juga merupakan wilayah di Indonesia yang seluruh pemerintah Provinsinya memiliki nilai rata-rata indeks demokrasi diatas 73,00, sedangkan wilayah Papua merupakan wilayah yang memiliki nilai rata-rata terendah indeks demokrasi dengan nilai 61,13 (predikat cukup).

Prinsip Transparansi

Pembangunan transparansi dalam bentuk pengungkapan dan penyediaan informasi oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia terdapat 30 atau 88% pemerintah provinsi dengan nilai rata-rata indeks transparansi dibawah 4 atau dengan predikat “buruk”, sedangkan sisanya dengan predikat “cukup” meliputi Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pembangunan transparansi oleh pemerintah provinsi di Indonesia masih cenderung buruk. Buruknya pembangunan transparansi ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah daerah pada aturan tentang transparansi yang telah diundangkan serta kurangnya komitmen dari kepala daerah untuk mengimplementasikan prinsip transparansi.

Prinsip Akuntabilitas

Pembangunan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia secara nasional masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata indeks akuntabilitas selama periode pengamatan hanya sebesar 53,86 (predikat cukup) dan juga hanya ada 10 pemerintah provinsi di Indonesia yang nilai rata-rata indeks akuntabilitasnya diatas 60 poin. Belum baiknya pembangunan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia disebabkan karena masih belum baiknya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintah yang disebabkan karena tidak profesional dalam penempatan pegawai, bahkan masih ditemuinya beberapa penempatan pegawai berdasarkan faktor politik dan faktor KKN. Provinsi Bali merupakan provinsi di Indonesia yang terbaik dalam pembangunan akuntabilitas, dimana nilai rata-rata indeks akuntabilitas Provinsi Bali adalah tertinggi di Indonesia yakni sebesar 88,80 (predikat sangat baik) sedangkan nilai rata-rata indeks akuntabilitas tertendah terdapat pada Provinsi Maluku Utara dengan nilai 27,66 (predikat buruk).

Selanjutnya wilayah Nusa Tenggara merupakan wilayah terbaik di Indonesia dalam pembangunan akuntabilitas, karena nilai rata-rata tertinggi indeks akuntabilitas untuk wilayah Nusa Tenggara lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia yakni sebesar 64,46 (predikat baik) sedangkan wilayah Sumatera merupakan wilayah dengan kualitas terendah untuk pembangunan akuntabilitas di Indonesia dengan nilai rata-rata indeks akuntabilitas sebesar 46,97 (predikat cukup).

Prinsip Budaya Hukum

Kondisi penegakan hukum dan ketaatan hukum pada pemerintah daerah di Indonesia secara nasional yang tercermin pada nilai indeks budaya hukum menunjukkan kondisi yang kurang baik, dimana nilai rata-rata indeks budaya hukum hanya sebesar 54,30 dengan predikat “cukup” dan hanya 12 provinsi di Indonesia yang menunjukkan predikat baik dalam praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum. Kondisi ini disebabkan karena masih belum baiknya integritas dari para penegak hukum, dimana masih ditemui beberapa oknum aparat penegak hukum yang dihukum karena kasus korupsi atas dugaan jual-beli perkara dan masih lemahnya sanksi hukum bagi para pelanggar hukum. Provinsi Jawa tengah merupakan provinsi terbaik di Indonesia dalam penegakan hukum dan juga ketaatan

pada hukum dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum selama periode pengamatan sebesar 84,43 (predikat sangat baik) sedangkan Provinsi Maluku merupakan provinsi terburuk dalam hal penegakan hukum dan juga ketaatan pada hukum dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum sebesar 22,65 (predikat buruk). Selanjutnya, praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum terbaik berada di wilayah Kalimantan dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum selama periode pengamatan sebesar 66,22 (predikat baik) sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah terburuk dalam praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum di Indonesia dengan nilai rata-rata indeks budaya hukum 34,03 (cukup).

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan

Praktek prinsip kewajaran dan kesetaraan oleh pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan hal yang sangat baik, dimana 85% pemerintah provinsi di Indonesia memiliki predikat sangat baik dalam praktek prinsip kewajaran dan kesetaraan dan predikat sangat baik ini merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Kalimantan merupakan wilayah terbaik di Indonesia dalam pembangunan kewajaran dan kesetaraan dengan berpredikat “sangat baik”, sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah terendah pembangunan kewajaran dan kesetaraan dengan “baik”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan metode *Principal Component Analysis* terdapat 26 atau 76,47% pemerintah provinsi yang pembangunan *good government governance* nya berkualitas “baik” dan 8 atau 23,53% pemerintah provinsi dengan kualitas “cukup baik”. Kualitas pembangunan *good government governance* di Indonesia mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, namun secara predikat tidak mengalami perubahan yakni tetap dengan predikat “baik”. Provinsi Bali merupakan pemerintah provinsi di Indonesia yang terbaik dalam membangun *good government governance*, sedangkan Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi terburuk.

Wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang lebih berkualitas dalam membangun *good government governance* sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah yang kualitas pembangunan *good government governancenya* terendah. Implikasi dari temuan ini berupa penggunaan metode *Principal Component Analysis* sebagai alternative pengukuran *good governance*. Selain itu, implikasi lainnya berupa lahirnya revisi undang-undang ataupun peraturan pemerintah/peraturan daerah tentang penerapan *good government governance* untuk mewujudkan peningkatan kualitas prinsip-prinsip *good government governance* serta sanksi dan *reward*. Penelitian ini hanya dilakukan pada lingkup pemerintah provinsi dan juga periode yang terbatas (2014-2018), sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan lingkup pemerintah kabupaten/kota dengan periode yang lebih panjang agar lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- AlBassam, B. A. (2013). The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis. *European Journal of Sustainable Development*, 2(2), 1–1. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2013.v2n2p1>
- Andhika, L. R. (2017). Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102. <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867>
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- BAPPENAS. (2007). Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik. Sekretariat Tim Pengembangan Bappenas.
- Cheung, C. (2013). Postmaterialist Influences on Welfare Adequacy and Political Trust in Hong Kong. *The Journal of Comparative Asian Development*, 12(1), 147–179. <https://doi.org/10.1080/15339114.2013.781423>
- Djasuli, M. (2013). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Tingkat Hutang, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Pamator Journal*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.21107/pamator.v6i1.3091>
- Djuaeni, A. (2015). Tantangan Penerapan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Inspirasi*, 6(2), 32–36. <https://doi.org/10.35880/v6i2.36>
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. UGM Press.
- Heriningsih, S., & Ruserlistyanti. (2015). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 11–19. <https://doi.org/10.31941/jebi.v13i2.189>
- Holzhacker, R. L., Wittek, R., & Woltjer, J. (2016). Decentralization and Governance for Sustainable Society in Indonesia. In R. L. Holzhacker, R. Wittek, & J. Woltjer (Eds.), *Decentralization and Governance in Indonesia* (pp. 3–29). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3_1
- Ibrahim, I. (2017). Menakar kedalaman pengukuran demokrasi model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa catatan substantif dari Kepulauan Bangka Belitung. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(2), 133–149. <https://doi.org/10.20473/mkp.V30I22017.133-149>

- Keser, A., & Gökmen, Y. (2018). Governance and Human Development: The Impacts of Governance Indicators on Human Development. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(1), 26. <https://doi.org/10.5296/jpag.v8i1.12336>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2010). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG.
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301–322. <https://doi.org/10.1177/0192512110377602>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Ottervik, M. G. (2011). 'Good' Governance and Human Development: The Case of China and India. *Spring*, 4–45.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(4), 431 – 450–431 – 450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538–553. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Rauf, M., Hidayat, S., Gismar, A., & Mulia, M. (2014). Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia 2013. Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan bekerjasama dengan BPS.
- Sebudubudu, D. (2010). The impact of good governance on development and poverty in Africa: Botswana—A relatively successful African initiative. *African Journal of Political Science and International Relations*, 4(7), 249–262.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737–783. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(1), 30–42. <https://doi.org/10.14710/jaa.8.1.30-42>

Susanto, D., Anggraeni Yusuf, D., & Rachmawati, Y. (2014). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, 12(02), 73–91.

World Bank. (2019). *Worldwide Governance Indicators 2018*. World Bank. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>

Zou, H., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2006). Sparse Principal Component Analysis. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 15(2), 265–286. <https://doi.org/10.1198/106186006X113430>